



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.15/MEN/2012
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2010-2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 – 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 -2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 sampai 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2010-2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut Renstra KKP, adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
2. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Renja KKP adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2 ...

Pasal 2

- (1) Menetapkan Renstra KKP, yang merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan program pembangunan kelautan dan perikanan.
- (2) Renstra KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Renstra KKP, meliputi:

- a. Pendahuluan, yang berisi kondisi umum, potensi, dan permasalahan;
- b. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis; dan
- c. Arah Kebijakan dan Strategi, yang berisi arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4

Renstra KKP sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyusun program, kegiatan, indikator, target dan anggaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Renstra KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Rencana Kerja KKP yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

Menteri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra KKP yang dituangkan dalam Rencana Kerja KKP.

Pasal 7

Program pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan dan dianggarkan pada tahun anggaran 2010 s.d. 2012 tetap mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014, selanjutnya program pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun anggaran 2013-2014 mengacu kepada Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2012

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 858

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN I: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.15/MEN/2012
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2010-2014

BAB I
PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-growth* (pertumbuhan), dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan).

Selama periode tahun 2010-2011, capaian hasil pembangunan kelautan dan perikanan ditandai dengan tercapainya beberapa target Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP, yakni:

1. Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan

PDB sub sektor perikanan memegang peranan strategis dalam memberikan kontribusi bukan hanya untuk PDB kelompok pertanian secara umum, tetapi juga pada PDB Nasional. Meskipun kontribusi PDB sub sektor perikanan dari tahun 2010 sampai dengan 2011 mengalami sedikit penurunan, namun dibandingkan dengan PDB sub sektor lain pada kelompok pertanian, PDB sub sektor perikanan mengalami kenaikan yang paling tinggi, yakni mencapai 14,23%.

PDB Sub Sektor Perikanan (Atas Dasar Harga Berlaku)
Tahun 2010-2011

(Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2010*)	2011*)	Kenaikan (%/thn)
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	985.448,8	1.093.466,0	10.96
• Tanaman Bahan Makanan	482.377,1	530.603,7	10.00
• Tanaman Perkebunan	136.026,8	153.884,7	13.13
• Peternakan dan hasilnya	119.371,7	129.578,3	8.55
• Kehutanan	48.289,8	51.638,1	6.93
• Perikanan	199.383,4	227.761,2	14.23
PDB	6.436.270,8	7.427.086,1	15.39
PDB TANPA MIGAS	5.936.237,8	6.794.373,4	14.46

LAPANGAN USAHA	2010*)	2011*)	Kenaikan (%/thn)
Persentase kontribusi PDB Subsektor Perikanan :			
Thd PDB Nasional	3,10	3,07	-0.97
Thd PDB Non-migas	3,36	3,35	-0.30

Sumber : BPS, 2011

Ket : * Angka sementara

Mempertimbangkan adanya pengaruh yang sangat besar dari kinerja sub sektor/sektor lain, maka Indikator Kinerja Utama kontribusi PDB Perikanan sejak tahun 2012 diubah menjadi Pertumbuhan PDB Perikanan. Pada tahun 2011, pertumbuhan PDB Perikanan mencapai 6,72%. Selanjutnya, kinerja pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun 2012 diperkirakan mampu memberikan pertumbuhan PDB Perikanan sebesar 6,95%.

2. Produksi Perikanan

Produksi perikanan nasional meningkat sebesar 6,2% per tahun, yakni dari 11,66 juta ton pada tahun 2010 menjadi 12,38 juta ton pada tahun 2011. Capaian produksi perikanan tersebut didukung oleh kontribusi produksi perikanan budidaya yang terus mengalami kenaikan, yakni mencapai 11,13% per tahun selama periode tahun 2010-2011.

Volume Produksi Perikanan Tahun 2010-2011

(Ton)

Rincian	Tahun		Kenaikan Rata-Rata (%)
	2010	2011	
Perikanan Tangkap	5.348.418	5.409.100	0,46
• Perikanan Laut	5.039.446	5.061.680	0,44
• Perairan Umum	344.972	347.420	0,71
Perikanan Budidaya	6.277.924	7.901.526	11,13
• Budidaya Laut	3.514.702	3.735.585	6,28
• Tambak	1.416.038	1.734.260	22,47
• Kolam	819.809	955.511	16,55
• Karamba	121.271	120.654	-0,51
• Jaring Apung	309.499	331.936	7,25
• Sawah	96.605	98.804	2,28
Jumlah	11.662.342	13.310.626	6,20

Tingginya produksi perikanan budidaya didukung oleh pencapaian produksi rumput laut yang mencapai sekitar 61% dari total produksi perikanan budidaya dan komoditas bandeng dan udang.

Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2010-2011

(Ton)

Rincian	Tahun		Kenaikan Rata-Rata (%)
	2010	2011	
Rumput laut	3.915.017	5.170.201	32,06
Udang	380.972	372.577	2,20
Kerapu	10.398	10.580	1,75
Kakap	5.738	5.236	-8,75
Bandeng	421.757	467.449	10,83
Mas	282.695	332.206	17,51
Nila	464.191	567.449	22,24
Lele	242.811	337.577	39,03
Patin	147.888	229.267	55,03
Gurame	56.889	64.252	12,94
Lainnya	349.568	344.732	-1,38
Jumlah	6.277.923	7.901.526	25,86

Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2010-2011

(Ton)

Rincian	Tahun		Kenaikan Rata-Rata (%)
	2010	2011	
Udang	245.662	247.760	0,85
Tuna	213.796	230.580	7,28
Cakalang	329.949	345.130	4,40
Tongkol	367.320	379.810	3,29
Ikan Lainnya	3.951.454	3.925.230	(0,67)
Lainnya	276.237	280.590	1,55
Jumlah	5.384.418	5.409.100	0,46

Memperhatikan capaian tahun 2010-2011, produksi perikanan pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 14,86 juta ton meliputi produksi perikanan tangkap sebesar 5,44 juta ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 9,42 juta ton.

Produksi perikanan tangkap dan budidaya menjadi pasokan dalam proses produksi ikan olahan. Selama kurun waktu 2010-2011, volume produk olahan meningkat dari 4,2 juta ton pada tahun 2010 menjadi 4,58 juta ton pada tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya ragam produk olahan bernilai tambah yang dihasilkan Unit Pengolahan Ikan (UPI), baik skala besar maupun UMKM dalam upaya memenuhi preferensi konsumen terhadap diversifikasi produk perikanan yang bermutu, aman dikonsumsi dan memiliki nilai tambah.

Volume Produksi Olahan Tahun 2010–2011

(juta ton)

Rincian	Tahun		Kenaikan Rata-rata (%)
	2010	2011	
Volume Produksi Olahan (Ton)	4,20	4,58	9,05

3. Ekspor Hasil Perikanan

Realisasi nilai ekspor hasil perikanan sampai dengan akhir Desember 2011 mencapai US\$ 3,52 miliar, dengan volume 1,16 juta ton. Capaian nilai ekspor ini meningkat 22,95% apabila dibandingkan dengan nilai ekspor hasil perikanan tahun 2010, yakni US\$ 2,86 miliar. Kontribusi nilai ekspor tertinggi adalah dari komoditas udang yakni mencapai 37,2 % dari total nilai ekspor hasil perikanan.

Volume, Nilai Ekspor-Impor dan Neraca Perdagangan Tahun 2010–2011

Rincian	Tahun		Kenaikan Rata-Rata (%)
	2010	2011	
Volume Ekspor (Ton)	1.103.575	1.159.349	5,05
Volume Impor (Ton)	369.282	431.871	16,95
Nilai Ekspor (US\$1.000)	2.863.830	3.521.091	22,95
Nilai Impor (US\$1.000)	391.815	488.351	24,64
Neraca Perdagangan (US\$1.000)	2.472.016	3.032.740	22,68

Peningkatan ekspor hasil perikanan ini disebabkan oleh arah kebijakan ekspor yang semakin baik meskipun ditengah terjadinya kondisi perekonomian yang memburuk di Eropa, yang ditandai dengan mulai diarahkannya tujuan ekspor dari pasar-pasar tradisional (Jepang, USA dan UE) ke pasar-pasar prospektif (Korea Selatan, China, Malaysia dan Timur Tengah). Di samping itu, peningkatan ekspor tersebut merupakan dampak dari penurunan kasus *Rapid Alert System* (RAS) yang menimpa produk perikanan Indonesia di pasar luar negeri. Selain itu, pemerintah Indonesia telah mendapatkan hak kembali untuk mengajukan *Approval Number* (*Re-authorized for Approval Number*) baru bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang akan mengekspor ke UE.

Kenaikan nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan dengan volumenya menunjukkan adanya peningkatan harga rata-rata produk perikanan yang diekspor, yang antara lain disebabkan sebagian besar ekspor telah mengarah pada produk bernilai tambah (*non primary product*). Disamping itu, neraca perdagangan hasil perikanan Indonesia memperlihatkan pertumbuhan surplus yang cukup tinggi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 22,68% per tahun. Pada tahun 2012, diperkirakan nilai ekspor hasil perikanan mencapai US\$ 4,2 miliar.

4. Konsumsi Ikan

Pada tahun 2011, capaian sementara rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional adalah 31,64 kg/kapita atau meningkat sebesar 4,81% apabila dibandingkan dengan rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional pada tahun 2010, yang besarnya 30,48 kg/kapita.

Rata-Rata Konsumsi Ikan Tahun 2010-2011

Rincian	Tahun		Kenaikan Rata-Rata (%)
	2010	2011	
Konsumsi Ikan (kg/kapita/thn)	30,48	31,64	4,81

Pencapaian rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional tahun 2011 menggambarkan bahwa produk perikanan untuk dikonsumsi tersedia cukup, baik yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya. Selain itu, peningkatan capaian rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional tersebut juga menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan kampanye Gemar Makan Ikan memberikan hasil yang signifikan.

5. Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

Pada Tahun 2011, capaian Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang ber-Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah 948 UPI atau meningkat sebesar 53,27% dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebanyak 505 UPI.

Perkembangan Jumlah UPI yang ber-SKP Tahun 2010-2011

Rincian	Tahun		Kenaikan Rata-Rata (%)
	2010	2011	
Jumlah UPI yang ber-SKP	505	948	53,27

Capaian sebanyak 948 UPI tersebut terdiri dari pembinaan terhadap 505 UPI yang telah ber-SKP dan penerbitan SKP bagi 443 UPI baru. Capaian tersebut diperoleh melalui pembinaan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka pemenuhan persyaratan dasar kelayakan pengolahan di UPI. Jumlah UPI yang ber-SKP tahun 2012 diperkirakan sebanyak 1.445 UPI. Untuk mendorong UPI agar mempunyai SKP, telah dilaksanakan sosialisasi pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan serta asistensi penerapan persyaratan kelayakan pengolahan di UPI.

6. Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan

Berdasarkan hasil perhitungan BPS, NTN tahun 2010 dan 2011 memiliki pola yang hampir sama, namun sepanjang tahun 2011 terdapat dua titik terendah yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli, tetapi nilainya masih diatas 105, artinya nelayan masih dapat menyimpan hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Sementara pada bulan September merupakan titik tertinggi, baik pada tahun 2010 maupun tahun 2011 dan bergerak turun sampai dengan akhir tahun. Angka Nilai Tukar Nelayan (NTN) sampai dengan Desember 2011 sebesar 106,4.

Nilai Tukar Nelayan, 2010-2011

Bulan		Nilai Tukar Nelayan	Perubahannya (%)
2010	JANUARI	105,05	-0.23
	FEBRUARI	105,30	0.24
	MARET	105,42	0.11
	APRIL	105,50	0.08
	MEI	105,46	-0.04
	JUNI	105,31	-0.14
	JULI	105,03	-0.27
	AGUSTUS	105,43	0.38
	SEPTEMBER	106,26	0.79
	OKTOBER	106,25	-0.01
	NOPEMBER	105,95	-0.28
	DESEMBER	105,69	-0.25
	RATA-RATA		105,55
Bulan		Nilai Tukar Nelayan	Perubahannya (%)
2011	JANUARI	105,59	-0,09
	FEBRUARI	105,63	0,04
	MARET	105,86	0,22
	APRIL	106,43	0,54
	MEI	106,63	0,19
	JUNI	106,81	0,17
	JULI	106,67	-0,13
	AGUSTUS	106,50	-0,16
	SEPTEMBER	106,47	-0,03
	OKTOBER	106,28	-0,18
	NOPEMBER	106,14	-0,13
	DESEMBER	105,83	-0,29
	RATA-RATA		106,24

7. Luas Kawasan Konservasi Perairan

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2010 dengan luas target kawasan konservasi perairan 900.000 hektar dapat direalisasikan seluas 1.270.000 hektar atau mencapai 114%. Luas kawasan konservasi perairan laut di Indonesia, saat ini mencapai 15,4 juta hektar.

Luas dan Tipe Kawasan Konservasi Perairan

No	Kawasan Konservasi	Jumlah Kawasan	Luas (Ha)
A	Inisiasi Kementerian Kehutanan	32	4.694.947
	Taman Nasional Laut	7	4.043.541
	Taman Wisata Alam Laut	14	491.248
	Suaka Margasatwa Laut	5	5.678
	Cagar Alam Laut	6	154.480
B	Inisiasi KKP dan Pemda	64	10.720.118
	Taman Nasional Perairan	1	3.521.130
	Suaka Perairan	3	453
	Suaka Alam Perairan	3	445.630
	Taman Wisata Perairan	6	1.541.040
	Daerah Perlindungan Laut/Mangrove	2	2.086
	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	56	5.209.778
Jumlah Total		103	15.415.065

Luas dan tipe kawasan konservasi perairan di atas merupakan kumulatif hasil kerjasama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan konservasi perairan. Target utama adalah mengelola kawasan konservasi perairan secara efektif berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2011 telah dilakukan upaya-upaya pengelolaan dalam kawasan konservasi tersebut, terdapat 14 kawasan dengan luasan mencapai 2,5 juta hektar atau tercapai 100%, dan jika dibandingkan dengan rencana target sampai 2014 secara agregasi seluas 4,5 juta hektar, maka sudah tercapai 56,50%.

8. Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola

Pada tahun 2011 tingkat capaian kinerja telah dilaksanakannya pengelolaan pada 37 pulau-pulau kecil atau mencapai 123%. Jika dibandingkan dengan rencana target sampai akhir Renstra tahun 2014 secara agregasi sebanyak 200 pulau-pulau kecil, maka sampai 2011 secara akumulasi sudah dicapai sejumlah 57 pulau-pulau kecil atau 28,50%.

Jumlah Pulau-Pulau Kecil,
termasuk Pulau Kecil Terluar yang Dikelola Tahun 2011

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah pulau-pulau kecil yang dikelola, termasuk pulau kecil terluar	30 Pulau	37 Pulau	123

Kegiatan yang dilakukan meliputi identifikasi potensi dan pemetaan PPK; fasilitasi penyediaan infrastruktur; rehabilitasi ekosistem dan fasilitasi investasi PPK. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data untuk menggali dan mengetahui potensi dari pulau-pulau kecil yang meliputi aspek biofisik perairan, flora dan fauna daratan serta kondisi sosial, ekonomi masyarakat terhadap pulau-pulau tersebut.

Untuk pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pulau-pulau kecil pada tahun 2011 dilaksanakan oleh pusat maupun provinsi melalui dana dekonsentrasi. Secara keseluruhan telah dilakukan identifikasi potensi dan pemetaan pulau-pulau kecil sebanyak 35 pulau pada tahun 2011. Pencapaian ini disebabkan karena adanya efektifitas pekerjaan yang dilakukan yaitu pelaksanaan identifikasi dan pemetaan potensi pulau-pulau kecil pada lokasi pulau yang berdekatan, sehingga dapat mengidentifikasi lebih dari satu pulau dalam sekali pelaksanaan.

9. Persentase Wilayah Perairan yang Bebas *Illegal Fishing* dan Kegiatan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Realisasi sasaran perairan Indonesia bebas *illegal fishing* dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan pada tahun 2011 telah tercapai sebesar 39,86% melebihi target yang ditetapkan sebesar 39,00% dengan persentase capaian sebesar 102,21%. Dibandingkan tahun 2010 dengan target persentase luas 34% diselesaikan sebesar 38,24% atau tingkat capaian 112,47%.

Capaian Kinerja Pengawasan SDKP Tahun 2011

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Wilayah Perairan bebas <i>Illegal Fishing</i> dan kegiatan yang merusak SDKP (%)	39%	39,86%	102,21

Dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* dilaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya operasi kapal pengawas baik secara mandiri maupun melalui operasi bersama dengan instansi penegak hukum lainnya (TNI-AL, Bakorkamla, dan Polair) serta negara lain (Australia dan Malaysia).

Selama tahun 2011, operasi kapal pengawas telah berhasil memeriksa sebanyak 3.348 kapal perikanan yang terdiri dari 79 Kapal Ikan Asing (KIA) dan 3.269 Kapal Ikan Indonesia (KII).

Dari seluruh kapal yang diperiksa tersebut, sebanyak 106 kapal perikanan terindikasi melakukan pelanggaran dan diadhoock ke pelabuhan terdekat, yang terdiri dari 31 KII dan 75 KIA. Jika dibandingkan dengan pencapaian hasil operasi kapal pengawas pada tahun 2010, terjadi peningkatan jumlah kapal yang diperiksa dari 2.253 kapal ikan menjadi 3.348 kapal ikan atau sebesar 48,6%, namun terjadi penurunan jumlah kapal ikan yang ditangkap dari 183 kapal ikan (158 KII & 24 KIA) menjadi 106 kapal ikan (31 KII & 75 KIA).

B. Potensi dan Permasalahan

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang pantai Indonesia mencapai 104.000 km (Bakosurtanal, 2006) dengan luas wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982 mencapai 284.210,9 km² laut teritorial, 2.981.211 km² ZEEI, dan 279.322 km² laut 12 mil. Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar.

Klasifikasi potensi tersebut pada umumnya dibedakan menjadi sumber daya terbarukan (*renewable resources*), seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), mangrove, terumbu karang, padang lamun, mineral air laut dan air laut dalam, energi gelombang, pasang surut, angin dan OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*), dan sumber daya tidak terbarukan (*non-renewable resources*), seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan, dan sebagainya.

Disamping itu terdapat potensi pengembangan untuk (a) perikanan tangkap di laut sebesar 6,5 juta ton dan di perairan umum seluas 54 juta hektar dengan potensi produksi 0,9 juta ton/tahun, (b) budidaya laut seluas 8,3 juta ha terdiri dari budidaya ikan (20%), budidaya kekerangan (10%), budidaya rumput laut (60%) dan lainnya (10%), (c) potensi budidaya air payau (tambak) seluas 1,3 juta ha, (d) budidaya air tawar terdiri dari kolam seluas 526,40 ribu ha, perairan umum (danau, waduk, sungai dan rawa) seluas 158,2 ribu ha, sawah untuk mina padi seluas 1,55 juta ha, serta (e) bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang, industri bahan pangan serta non pangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti untuk industri kesehatan dan kosmetika (farmasetika laut).

Selain itu juga terdapat potensi dan peluang pengembangan meliputi (a) pengembangan pulau-pulau kecil, (b) pemanfaatan Benda Berharga asal Muatan Kapal Tenggelam, (c) pemanfaatan air laut dalam (*deep sea water*), (d) industri garam rakyat, (e) pengelolaan pasir laut, (f) industri penunjang, dan (g) keanekaragaman hayati laut.

Peluang pengembangan usaha kelautan dan perikanan Indonesia masih memiliki prospek yang sangat tinggi. Potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah lingkup tugas KKP dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang diperkirakan sebesar US\$ 82 miliar per tahun.

Disamping adanya potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar, terdapat pula potensi kelembagaan, antara lain seperti peranan Komisi Tuna Indonesia, Komisi Udang, Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin), Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI), LSM bidang kelautan dan perikanan, dan lain-lain, diharapkan di masa datang perlu terus disinergikan. Potensi lain adalah potensi sarana dan prasarana yang telah dimiliki, seperti Unit Pelaksana Teknis di daerah yakni Pelabuhan Perikanan, Balai Budidaya, Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan, Balai Litbang, Balai Karantina Ikan, dan Sekolah Perikanan.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menjadikan sektor ini sebagai *prime mover* pembangunan ekonomi nasional, diperlukan upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan ekonomi serta iklim sosial politik yang kondusif. Dalam kaitan ini, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta para pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting.

Pembangunan kelautan dan perikanan memiliki banyak nilai strategis, antara lain:

1. Potensi geografis, ekonomi, sosial, dan ekologi yang sangat besar dan beragam dari perairan laut dan kepulauan di Indonesia, dapat menjadi modal sumberdaya alamiah yang besar bagi pembangunan bangsa Indonesia;
2. Sumberdaya kelautan dan perikanan dapat menjadi basis pembangunan ekonomi secara berkelanjutan;
3. Pengembangan industri kelautan dan perikanan dapat menciptakan *backward* dan *forward linkage* industri yang tinggi.

4. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia, peningkatan permintaan akan produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan kesadaran akan gizi ikan yang lebih sehat dapat menjadi peluang pengembangan pasar bagi komoditas dan produk perikanan Indonesia;
5. Melalui penguasaan dan penegakan kedaulatan kelautan, maka pertahanan dan keamanan nasional dan kedaulatan wilayah dapat lebih terjamin;
6. Secara sosio-kultural kembali fokus ke pembangunan kelautan dan perikanan merupakan wujud upaya untuk mengembalikan kembali kejayaan maritim Indonesia yang pernah dicapai di masa lalu.

Melihat potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang begitu besar, maka tantangan lain yang timbul adalah maraknya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) oleh kapal-kapal ikan asing yang berdampak merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Ancaman *illegal fishing* kedepan diperkirakan intensitasnya terus meningkat, hal tersebut sejalan dengan kondisi perikanan global saat ini di beberapa negara yang mengalami penurunan stok ikan dan tingginya permintaan produk perikanan serta pengurangan armada kapal penangkapan ikan oleh berbagai negara akibat menyempitnya peluang izin penangkapan. Hal ini mendorong negara-negara disekitar Indonesia yang memiliki armada besar melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia dengan berbagai modus operandi serta menggunakan teknologi yang lebih canggih dan terkoordinir dengan baik, disisi lain kemampuan pengawasan SDKP di Indonesia masih sangat lemah dan perairan Indonesia sangat terbuka. Melihat ancaman dan tantangan tersebut, pengawasan SDKP perlu ditingkatkan sebagaimana amanat UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, melalui pengembangan sistem pemantauan SDKP, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, pemenuhan regulasi bidang pengawasan dan kelembagaan di tingkat daerah serta kerjasama secara intensif dengan instansi lain dan menggalang komitmen serta dukungan internasional dalam penanggulangan *illegal fishing*.

Permasalahan lain yang dihadapi antara lain terkait dengan masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang antara lain disebabkan struktur armada yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir, dan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dibangun. Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, dan serangan hama dan penyakit

ikan/udang serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya. Indonesia juga masih menghadapi beberapa kondisi yang belum sepenuhnya dapat mendukung untuk memenuhi persyaratan mutu produk ekspor hasil perikanan yang semakin ketat dari negara pengimpor, seperti Uni Eropa. Disamping itu, aspek yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas yang sangat mendasar adalah dalam aspek kualitas SDM dan kelembagaannya. Dimana jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan sangat besar dan dengan pengetahuan, penguasaan teknologi dan kemampuan serta infrastuktur untuk akses informasi yang minim dan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia yang berkepulauan. Diperparah oleh minimnya kelembagaan yang menaungi kegiatan usaha mereka dengan posisi tawar dan sistem organisasinya yang lemah.

Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan yang dihadapi adalah masih belum diperolehnya dukungan permodalan usaha dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Dalam kaitan ini, nelayan/pembudidaya ikan masih kesulitan mengakses kredit karena tidak dapat memenuhi persyaratan perbankan.

Aktifitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berada di daratan maupun sepanjang pesisir pantai dan di lautan, tidak luput dari tantangan alam dan potensi bencana alam yang dapat terjadi. Bencana alam seringkali menimbulkan berbagai kerusakan mulai dari tingkat ringan hingga berat yang merusak sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, perumahan penduduk hingga korban jiwa, yang memerlukan upaya mitigasi yang lebih baik.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut.

Munculnya paradigma untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan: Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Untuk itu, perlu pelaksanaan konsep *blue economy* dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada pelestarian sumber daya untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pengembangan *blue economy* tersebut diharapkan dapat menciptakan daya saing yang lebih tinggi melalui inovasi dan efisiensi yang berkelanjutan, melakukan pembangunan tanpa merusak lingkungan, menciptakan berbagai industri baru di bidang kelautan dan perikanan, serta menciptakan lapangan kerja. Upaya pengembangan *blue economy* perlu pula diiringi upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan dan perikanan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta disertai upaya untuk mengelola wilayah laut nasional secara terintegrasi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil, (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara, (3) mendorong perluasan kesempatan kerja, (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, (5) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, (8) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan, dan (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah (1) melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, (2) menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, (3) memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan, dan (4) meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan kelautan dan perikanan sejak tahun 2010 sampai tahun 2012, diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan kelautan dan perikanan, terutama untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan. Untuk itu, KKP akan mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang akan dimulai sejak tahun 2012, dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui industrialisasi, para pelaku usaha perikanan mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, sekaligus membangun sistem produksi yang modern dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Dengan demikian, industrialisasi perikanan diharapkan mampu mengokohkan struktur usaha perikanan nasional, yang membawa *multiplier effect* sebagai *prime mover* perekonomian nasional.

Disamping itu, KKP mulai tahun 2012 akan melaksanakan beberapa kebijakan baru yakni Program Peningkatan Kehidupan Nelayan yang merupakan bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dan pengembangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di 3 Koridor Ekonomi yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 yang telah ditetapkan sebelumnya dilakukan penyesuaian dan ditetapkan sebagai berikut:

A. Visi

Visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Melalui visi tersebut, diharapkan dapat terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dapat memberikan nilai tambah terhadap produk kelautan dan perikanan sehingga memiliki daya saing yang tinggi, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah:

1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
3. Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

C. Tujuan

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Usaha Kelautan dan Perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
 - a. meningkatnya peran sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan;
 - c. meningkatnya pendapatan.
2. Berkembangnya Diversifikasi dan Pangsa Pasar Produk Hasil Kelautan dan Perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
 - a. meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan;
 - b. meningkatnya *branding* produk perikanan dan *market share* di pasar luar negeri;
 - c. meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar.
3. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
 - a. terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan;
 - b. meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil;

c. meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparaturngawas Kementerian Kelautan dan Perikanan.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya peranan sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan.
2. Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan garam rakyat.
3. Meningkatnya pendapatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan.
4. Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya konsumsi ikan per kapita.
5. Meningkatnya *branding* produk perikanan dan *market share* di pasar luar negeri. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan.
6. Meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah menurunnya jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra.
7. Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah luas Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutan.
8. Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah jumlah pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar yang dikelola.
9. Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparaturngawas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah persentase wilayah perairan bebas *illegal fishing* dan kegiatan yang merusak SDKP.

Secara terinci, target Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dicapai tahun 2013-2014 sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2013-2014**

No	Rincian IKU	Target		Kenaikan (%/thn)
		2013	2014	
1	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan (%/thn)*	7.00	7.25	4.74
2	Produksi Kelautan dan Perikanan (juta ton)	18.49	22.39	17.93
	• Perikanan tangkap	5.47	5.5	0.55
	• Perikanan budidaya	13.02	16.89	28.51
	• Garam rakyat	1.85	3.3	60.50
3	Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan	110	112	1.82
4	Tingkat Konsumsi Ikan Dalam Negeri (kg/kapita/thn)	35.14	38.00	5.68
5	Nilai Ekspor Komoditas Perikanan (US\$ miliar)	5.0	6.0	20.36
6	Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra (kasus)	< 10	< 10	-
7	Luas Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang dikelola secara berkelanjutan (juta ha)	Pengelolaan 3,6 juta ha; Penambahan 500 ribu ha	Pengelolaan 4,5 juta ha; Penambahan 500 ribu ha	61.43
8	Jumlah pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau terluar yang dikelola (pulau)	60	30	24.12
9	Wilayah Perairan bebas IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP (%)	41	50	9.79

* berdasarkan harga konstan 2000

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 diarahkan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.

Penguatan daya saing perekonomian tersebut, diantaranya ditempuh melalui peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan kelautan meliputi industri kelautan seperti perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral yang dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan.

Kerangka pencapaian tujuan RPJMN II tersebut dirumuskan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 (Renstra KKP) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda pembangunan nasional, serta 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional, yakni (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 terkait dengan 5 prioritas pembangunan nasional, yakni:

1. Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.

2. Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan
Penurunan tingkat kemiskinan nasional absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.
3. Prioritas 5: Ketahanan Pangan
Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014.
4. Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.
5. Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik
Program aksi untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik ditujukan untuk pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca konflik.

Disamping terkait dengan 5 prioritas pembangunan nasional tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga terkait dengan Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Lintas Bidang, yakni yang terkait dengan Perubahan Iklim Global dan Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan.

Pembangunan kelautan dan perikanan berada dalam lingkup Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH). SDA-LH sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai dengan fungsinya tersebut, SDA-LH perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang. Lingkup pembangunan bidang SDA-LH meliputi (1) revitalisasi pertanian, dan (2) perbaikan pengelolaan SDA dan perbaikan fungsi LH. Pelaksanaan dari kebijakan ini memberikan hasil terhadap meningkatnya peran SDA dan LH dalam perkembangan

perekonomian nasional. Hal ini dicerminkan dengan semakin meningkatnya kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor-sektor yang berbasis SDA dan LH terhadap pembentukan PDB nasional selama periode tersebut. Selain itu, sektor-sektor yang berbasis SDA dan LH juga menjadi tumpuan utama bagi sebagian besar tenaga kerja, terutama di perdesaan dan pesisir.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan diimplementasikan dalam keterkaitannya dengan 5 prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Prioritas ke-1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, yang akan dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kinerja kementerian dalam pelayanan publik, pengelolaan keuangan negara menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penataan organisasi, dan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur dan instansi pemerintah.
2. Prioritas ke-4 : Penanggulangan Kemiskinan, yang dalam implementasinya akan dilaksanakan untuk memberikan kontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan nasional, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan, serta petambak garam melalui perluasan jangkauan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (klaster 4), pengembangan lembaga pembiayaan kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas skala usaha dan kewirausahaan menjadi usaha yang *bankable*.
3. Prioritas ke-5 : Ketahanan Pangan, yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan melanjutkan revitalisasi perikanan dalam mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan produksi, peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan industrialisasi kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan minapolitan, peningkatan konsumsi ikan per kapita, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan laju pertumbuhan PDB perikanan menjadi 7,25% pada tahun 2014 dan Indeks Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya sebesar 115 pada tahun 2014.

4. Prioritas ke-9 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, yang akan dilaksanakan melalui pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan pemanfaatan lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana melalui pengembangan kapasitas SDM dan riset tentang perubahan iklim dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan laut.
5. Prioritas ke-10 : Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik, yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dan terdepan/terluar, serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik yang akan diimplementasikan melalui pengelolaan/pemberdayaan pulau-pulau terluar dan pengembangan ekonomi alternatif berbasis sumber daya kelautan dan perikanan.

Terkait dengan pengarusutamaan dan lintas bidang, pembangunan kelautan dan perikanan akan mendukung 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yakni: (1) ekonomi, dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan PDB perikanan, dan dampak ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan; (2) sosial, tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marjinal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan (3) lingkungan hidup, dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Disamping itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi pembangunan nasional *pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment*, akan dilakukan melalui:

1. *Pro poor*
Pendekatan *Pro-poor* dilakukan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.
2. *Pro job*
Pendekatan *Pro-job* dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan budidaya yang belum tergarap dan penumbuhan wirausaha baru untuk menurunkan tingkat pengangguran nasional. Usaha membuka lapangan kerja diiringi dengan dukungan pengembangan akses terhadap modal dan kepastian berusaha.

3. *Pro growth*

Pendekatan *pro-growth* dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional melalui transformasi pelaku ekonomi kelautan dan perikanan, dari pelaku ekonomi subsisten menjadi pelaku usaha modern, melalui berbagai dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan modernisasi.

4. *Pro-environment*

Pendekatan *pro-environment* dilakukan melalui upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) berdasarkan keadilan, KKP akan mengimplementasikan prinsip-prinsip *blue economy* dalam pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana telah disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rio+20 di Rio de Janeiro, Brazil untuk mengelola dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan melalui penggunaan sumber daya kelautan dan perikanan secara efisien dan tidak merusak lingkungan, menyinergikan pengelolaan ekosistem laut dengan ketahanan pangan, strategi pembangunan ekonomi dan sosial serta transisi ekonomi, pasar, industri dan masyarakat menuju pola yang lebih berkelanjutan.

Pembangunan kelautan dan perikanan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung kerja sama lintas sektor/instansi terkait seperti: pemberdayaan perempuan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, dan lain sebagainya. Disamping itu, KKP juga melaksanakan beberapa Rencana Aksi Nasional (RAN) diantaranya RAN perubahan iklim, RAN hak asasi manusia, RAN Pemberantasan Korupsi, RAN Kepemudaan dan lain sebagainya.

Menjabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan, maka arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah produk.
2. Pengembangan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan *traceability* (penelusuran) produk hasil perikanan dan jaminan ketersediaan bahan baku industri.

3. Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan upaya adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
5. Pengembangan sumberdaya manusia dan iptek kelautan dan perikanan.
6. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat perikanan dengan fokus pada Program Peningkatan Kehidupan Nelayan.
7. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sektor kelautan dan perikanan, terutama di Koridor Ekonomi Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua.

Selanjutnya, strategi yang akan dilakukan untuk melaksanakan arah kebijakan nasional dan KKP sebagaimana tersebut di atas adalah melalui :

1. Pengembangan Kawasan

a. Minapolitan

Minapolitan merupakan upaya percepatan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengembangan minapolitan bertujuan untuk (i) meningkatkan produksi perikanan, produktivitas usaha, dan meningkatkan kualitas produk kelautan dan perikanan, (ii) meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang adil dan merata, serta (iii) mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat. Adapun sasaran pengembangan minapolitan adalah (i) ekonomi rumah tangga masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil makin kuat, (ii) usaha kelautan dan perikanan kelas menengah ke atas makin bertambah dan berdaya saing tinggi, serta (iii) sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi nasional.

Pendekatan pengembangan minapolitan dilakukan melalui:

- 1) Ekonomi Kelautan dan Perikanan Berbasis Wilayah
Mendorong penerapan manajemen hamparan untuk mencapai skala ekonomi, mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, sekaligus mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan sarana produksi, proses produksi, pengolahan dan pemasaran hasil dan pengelolaan lingkungan dalam suatu kesisteman yang mapan.

- 2) Kawasan Komoditas Unggulan
Memacu pengembangan komoditas yang memiliki kriteria (i) bernilai ekonomis tinggi, (ii) teknologi tersedia, (iii) permintaan pasar besar, dan (iv) dapat dikembangkan secara massal.
- 3) Sentra Produksi
Minapolitan berada dalam kawasan pemasok hasil perikanan (sentra produksi perikanan) yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin.
- 4) Unit Usaha
Seluruh unit usaha dilakukan dengan menggunakan prinsip bisnis secara profesional dan berkembang dalam suatu kemitraan usaha yang saling memperkuat dan menghidupi.
- 5) Penyuluhan
Penguatan kelembagaan dan pengembangan jumlah penyuluh merupakan salah satu syarat mutlak keberhasilan pengembangan minapolitan. Penyuluh akan berperan sebagai fasilitator dan pendamping penerapan teknologi penangkapan dan budidaya ikan serta pengolahan hasil perikanan.
- 6) Lintas Sektor
Minapolitan dikembangkan dengan dukungan dan kerjasama berbagai instansi terkait untuk mendukung kepastian usaha antara lain terkait dengan sarana dan prasarana pemasaran produk perikanan, tata ruang wilayah, penyediaan air bersih, listrik, akses jalan, dan BBM.

b. Pengembangan Ekonomi Regional

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011-2025, terdapat 6 (enam) Koridor Ekonomi (KE) yang akan dikembangkan, yakni KE Sumatera, KE Jawa, KE Kalimantan, KE Sulawesi, KE Bali-Nusa Tenggara, dan KE Papua-Kepulauan Maluku.

Pelaksanaan MP3EI dikoordinasikan oleh Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), yang diketuai oleh Presiden R.I., dengan Ketua Harian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. KP3EI dibantu oleh Tim Kerja, yang terdiri dari Tim Kerja Regulasi, Tim Kerja Konektivitas, Tim Kerja SDM dan Iptek, serta 6 (enam) Tim Kerja Koridor Ekonomi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) No. 35/M.EKON/08/2011 tentang Tim Kerja pada KP3EI, Menteri Kelautan dan Perikanan ditunjuk sebagai Ketua Tim Kerja Koridor Ekonomi Sulawesi, dimana Koridor Ekonomi Sulawesi akan mengembangkan 5 kegiatan ekonomi utama, yakni pangan, kakao, perikanan, migas, dan nikel.

Kegiatan kelautan dan perikanan tahun 2012-2014 akan mengisi pengembangan KE Sulawesi, KE Bali-Nusa Tenggara, dan KE Papua-Kepulauan Maluku. Beberapa kegiatan yang akan dikembangkan antara lain pengembangan prasarana pelabuhan perikanan, industri rumput laut, industri pengolahan ikan, budidaya ikan dan rumput laut, dll.

Dalam kaitan ini, pengembangan akan dilakukan di beberapa lokasi Kawasan Perhatian Investasi (KPI) di setiap Koridor Ekonomi yang akan lebih diprioritaskan bagi masuknya investasi swasta. Diharapkan pada tahun 2014 dapat dicapai peningkatan PDRB di setiap Koridor Ekonomi.

2. Penguatan Kelembagaan, SDM dan Iptek

Kelembagaan yang kuat dan mandiri dengan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang berpengetahuan dan menguasai teknologi akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, SDM dan penguasaan iptek akan menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi persaingan pasar global.

Keberadaan kelompok masyarakat di bidang budidaya, penangkapan ikan, pengolahan, pemasaran dan kelompok pengawasan akan memberikan keuntungan bagi anggota kelompoknya. Melalui kelompok akan terjadi interaksi antar anggota untuk saling tukar pengalaman dan menumbuhkan kesadaran bersama untuk menguatkan posisi tawar, serta kemudahan dalam pembinaan, penyampaian informasi, dan diseminasi teknologi. Kelompok-kelompok yang sudah

terbentuk, seperti Pokdakan (kelompok pembudidaya ikan), KUB (Kelompok Usaha Bersama) penangkapan ikan, KUGAR (Kelompok Usaha Garam Rakyat), Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas), dan Pokmas (Kelompok Masyarakat) pengelola terumbu karang, akan terus diupayakan keberadaannya dan ditingkatkan kapasitasnya, sedangkan kelompok-kelompok baru akan ditumbuhkan.

Selain penguatan kelembagaan kelompok masyarakat, diperlukan pula penguatan kelembagaan birokrasi pelaksana pembangunan KP, baik di pusat maupun di daerah. Kondisi ini diharapkan dapat mewujudkan kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penguatan SDM KP diterjemahkan sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM KP yang dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan/pendampingan. Sasaran upaya ini adalah masyarakat pelaku kegiatan (pelaku utama dan pelaku usaha) di bidang kelautan dan perikanan serta aparatur yang memfasilitasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Kapasitas yang diberikan merupakan penerjemahan ilmu pengetahuan dan teknologi terekomendasi ke dalam tataran praktis yang akan berimplikasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha dan produksi di sektor kelautan dan perikanan. Pendekatan pelaksanaannya dilakukan melalui 2 metode, yaitu pendekatan jangka pendek dan pendekatan jangka panjang. Pendekatan jangka pendek diarahkan melalui kegiatan pelatihan KP, untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan teknis para pelaku utama dan penyuluhan KP, sebagai upaya pendampingan yang dilakukan oleh para penyuluh perikanan agar para pelaku dapat melakukan kegiatan usahanya secara baik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi dan kesejahteraannya, serta kegiatan pendidikan yang bersifat non formal yaitu *community collage* dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (Paket Kejarikan). Sedangkan pendekatan jangka panjang dilakukan melalui pendidikan formal yang menghasilkan lulusan terdidik kompeten yang akan mengisi kebutuhan SDM pelaku kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan.

Selanjutnya, penguatan dan penguasaan iptek pada kegiatan usaha masyarakat (penangkapan dan pembudidayaan ikan, pengolahan produk perikanan serta pemasarannya), pengelolaan sumber daya perikanan, dan pemanfaatan sumber daya baru ekonomi kelautan (farmasetika laut, energi laut, air laut dalam, garam dan produk turunannya), serta pengelolaan mitigasi terhadap bencana laut untuk meminimalkan dampak

bencana terhadap masyarakat pesisir beserta aktivitasnya menjadi suatu kebutuhan dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang maju dan mandiri serta sejahtera.

Peran penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan dalam penguatan dan penguasaan iptek di masyarakat adalah dengan menyediakan data dan informasi, produk-produk biologi unggul (calon induk dan benih unggul, vaksin, probiotik, dsb), paket teknologi, rekomendasi, dan penerapan pengembangan kawasan yang diimplementasikan dalam bentuk teknologi tepat guna yang inovatif dan adaptif, serta model penerapan iptek di masyarakat. Dalam konteks skala dan pelaku ekonomi yang lebih luas penerapan iptek yang inovatif dan adaptif ditujukan untuk mendorong aktivitas ekonomi berbasis dan berorientasi laut dan perikanan, berdasarkan optimalisasi modal sosial masyarakat terutama kearifan lokal, efisiensi pemanfaatan sumberdaya untuk meminimalisasi limbah serta pengembangan sektor riil yang inovatif untuk kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem.

3. Pemberdayaan dan Kewirausahaan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak dasar masyarakat secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan bermartabat, maka dibutuhkan pemberdayaan masyarakat.

Pada prinsipnya, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberi fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan menuju kemandirian dan kesejahteraan. Secara umum, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kultur, penguatan lembaga keuangan mikro, penggalangan partisipasi masyarakat, dan kegiatan usaha ekonomi produktif yang berbasis sumber daya lokal.

Pemberdayaan masyarakat ini dalam jangka panjang diarahkan untuk (a) peningkatan kemandirian masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan masyarakat, (b) peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan

sumber daya secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan, (c) pengembangan kemitraan dengan lembaga swasta dan pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat merupakan perwujudan komitmen KKP dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungan KKP dilaksanakan melalui :

a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan

KKP sejak tahun 2009 telah melaksanakan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) dibawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri KP dilaksanakan melalui tiga komponen yaitu Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), dan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).

Tujuan PNPM Mandiri KP adalah meningkatkan kemampuan usaha dan kesejahteraan, pengembangan wirausaha anggota Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP), serta meningkatnya kualitas lingkungan. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah berkembangnya KUKP di Kabupaten/Kota yang mencakup kegiatan perikanan tangkap, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan usaha garam rakyat serta masyarakat pesisir lainnya.

Melalui pelaksanaan PNPM Mandiri KP diharapkan diperoleh keluaran berupa tersalurkannya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada KUKP, dan terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kelembagaan KUKP melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, sedangkan hasil yang akan dicapai adalah meningkatnya produksi, pendapatan, dan penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan serta meningkatnya kualitas lingkungan di dalam kelompok mandiri.

b. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN)

Sejak tahun 2012, Pemerintah telah menetapkan kebijakan baru yakni penerapan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI). Salah satu program terkait dengan KKP yang akan mengisi MP3KI adalah Program Peningkatan Kehidupan Nelayan

(PKN) yang merupakan bagian dari program-program pro rakyat/klaster 4. Untuk mengoordinasikan Program PKN, berdasarkan Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2011, tanggal 15 April 2011, tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-rakyat, Menteri Kelautan dan Perikanan telah ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Kerja Program PKN yang mengoordinasikan 12 K/L terkait, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik, Bappenas, Kementerian ESDM, dll.

Dalam kaitan ini, Presiden R.I. telah mengarahkan secara spesifik untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembuatan rumah sangat murah, pemberian pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan, skema UMK dan KUR, pembangunan SPBU solar, pembangunan *cold storage*, angkutan umum murah, fasilitas sekolah dan puskesmas, dan fasilitas 'bank rakyat'.

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) dan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), saat ini jumlah desa pesisir mencapai 10.640 desa, yang merupakan desa miskin dan harus ditangani secara lintas sektor. Sementara itu, dari penduduk miskin sebanyak 31,02 juta orang, sebesar 25,14% atau 7,87 juta orang adalah penduduk miskin di pesisir. Rumah Tangga Sasaran (RTS) di pesisir mencapai 2,13 juta RTS, yang terdiri dari RTS sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Kesemua ini merupakan target Program PKN yang lokasinya akan mengambil basis pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang untuk tahun 2011 akan masuk di 100 lokasi PPI, tahun 2012 di 400 lokasi PPI, tahun 2013 di 200 lokasi PPI, dan tahun 2014 di 116 lokasi PPI.

Untuk mengimplementasikan Program PKN tersebut, KKP akan melakukan intervensi langsung pada individu nelayan, kelompok nelayan, dan sarana prasarana PPI. Beberapa kegiatan untuk individu nelayan mencakup pemberian Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan dan bantuan peralatan rantai dingin. Untuk kelompok nelayan akan diberikan bantuan kapal penangkap ikan, bantuan langsung melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan, serta pemberian pendampingan pada kelompok. Sedangkan untuk mendukung pengembangan sarana prasarana di PPI,

akan dilakukan pembangunan *cold storage*/pabrik es, pembangunan SPDN (*Solar Packed Dealer* Nelayan), dan kendaraan roda 3 berinsulasi. Di samping itu, terdapat beberapa dukungan lintas sektor yang akan dilakukan pada lokasi Program PKN, antara lain dari Kementerian Perumahan Rakyat yang akan melakukan pembangunan rumah Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP), Kementerian ESDM yang akan memberikan listrik sangat murah untuk rumah nelayan, Kementerian Pekerjaan Umum yang akan membangun sarana air bersih di lokasi PPI, Kementerian Perhubungan akan dilaksanakan *Basic Safety Training* (BST) untuk nelayan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan akan memberikan pelayanan kesehatan dan penyediaan sarana/prasarana kesehatan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan bantuan beasiswa dan penyediaan sekolah di lokasi desa nelayan. Diharapkan Program PKN dilakukan melalui kerjasama lintas Kementerian/Lembaga sehingga dapat mendorong terwujudnya percepatan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Sementara itu dalam rangka pengembangan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha (*entrepreneurship*), pelaksanaannya dilakukan melalui upaya membangun kepercayaan (*trust building*) bagi para pelaku, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan. Jiwa *entrepreneurship* para pelaku tersebut dibangun agar para pelaku dapat memanfaatkan fasilitas guna memperlancar pengelolaan usaha, baik yang diperoleh melalui kredit maupun melalui program-program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pengembangan kewirausahaan dilakukan dalam rangka penciptaan lapangan usaha di sektor kelautan dan perikanan bagi sarjana terdidik yang masih menganggur. KKP akan melakukan pembekalan dan motivasi dilanjutkan dengan pelatihan/magang mengenai budidaya perikanan, penangkapan, pengolahan dan pemasaran serta pembuatan proposal.

4. Industrialisasi Kelautan dan Perikanan

Salah satu strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang dimulai tahun 2012 adalah industrialisasi kelautan dan perikanan. Industrialisasi kelautan dan perikanan adalah integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumberdaya kelautan dan perikanan secara

berkelanjutan. Tujuan industrialisasi kelautan dan perikanan adalah terwujudnya percepatan pendapatan pembudidaya, nelayan, pengolah, pemasar, dan petambak garam. Sasaran yang akan dicapai melalui industrialisasi kelautan dan perikanan adalah meningkatnya skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumberdaya kelautan dan perikanan.

Pendekatan industrialisasi kelautan dan perikanan dilakukan melalui penataan sistem dan manajemen yang mencakup:

- a. Pengembangan komoditas dan produk unggulan berorientasi pasar;
- b. Penataan dan pengembangan kawasan dan sentra produksi secara berkelanjutan;
- c. Pengembangan konektivitas dan infrastruktur;
- d. Pengembangan usaha dan investasi;
- e. Pengembangan iptek dan sumber daya manusia;
- f. Pengendalian mutu dan keamanan produk;
- g. Penguatan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

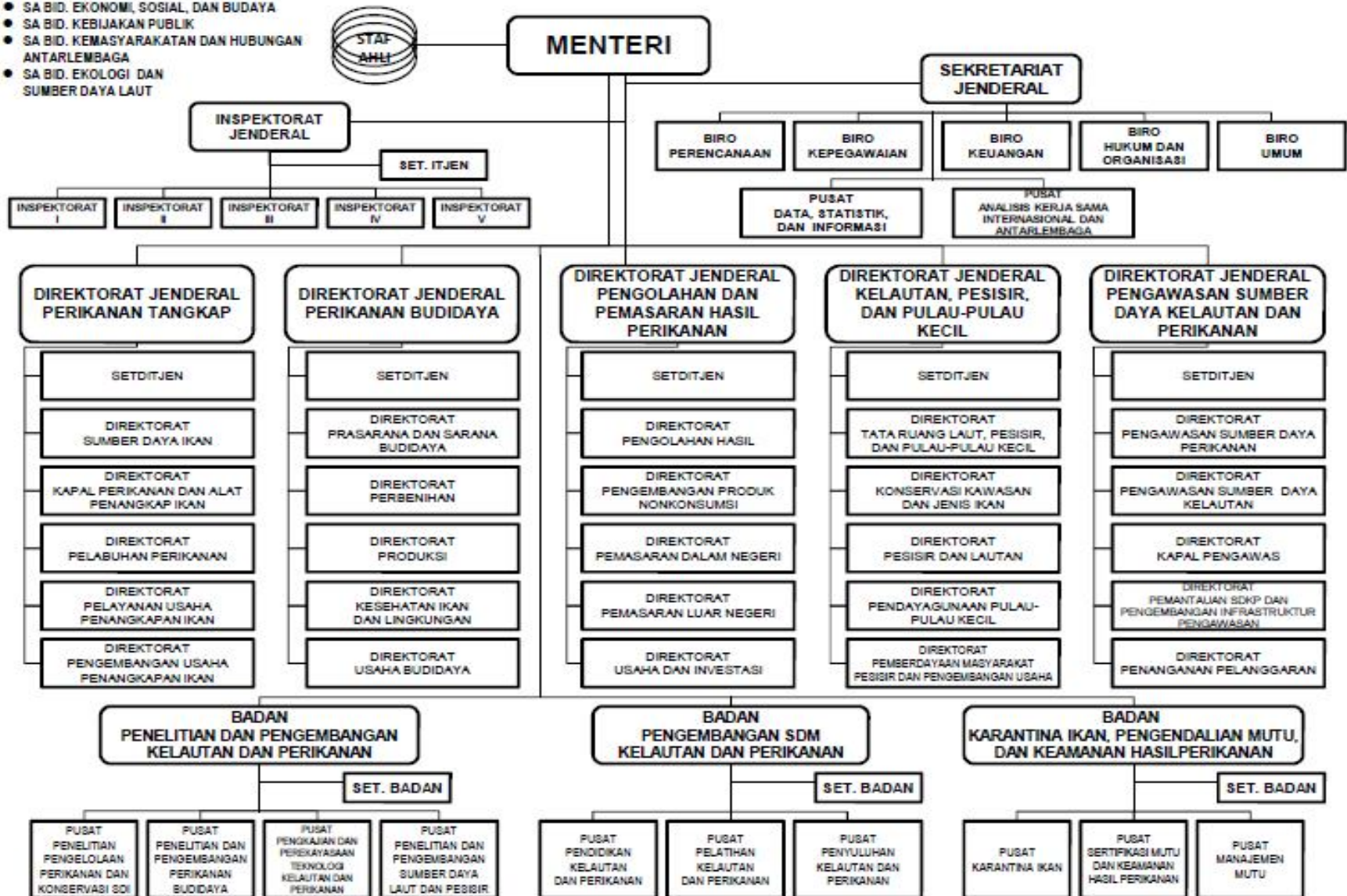
Langkah operasional pengembangan industrialisasi kelautan dan perikanan akan dijabarkan lebih lanjut dalam peta jalan (*roadmap*) industrialisasi kelautan dan perikanan tahun 2013-2014 untuk setiap komoditas dan lokasi prioritas.

Dengan dilaksanakannya industrialisasi kelautan dan perikanan yang dimulai secara bertahap sejak tahun 2012, maka ditargetkan diperoleh nilai tambah disisi hulu dan hilir. Hal tersebut sangat memerlukan banyak dukungan dari berbagai pihak, terutama dukungan penyediaan prasarana/infrastruktur produksi. Dalam kaitan ini, KKP akan mendorong sinergi lintas K/L, pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha dan masyarakat.

C. Program dan Kegiatan KKP

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan akan diimplementasikan melalui program dan kegiatan, yang sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- SA BID. EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
- SA BID. KEBIJAKAN PUBLIK
- SA BID. KEMASYARAKATAN DAN HUBUNGAN ANTARLEMBAGA
- SA BID. EKOLOGI DAN SUMBER DAYA LAUT



1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

Tujuan program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap adalah meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan berbasis pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, dengan sasaran peningkatan produksi perikanan tangkap (volume dan nilai), peningkatan pendapatan nelayan, dan peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan;
- c. Pengembangan, Pembangunan, dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
- d. Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan;
- e. Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil;
- f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT).

Unit kerja penanggung jawab program adalah Ditjen Perikanan Tangkap.

2. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Tujuan program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya adalah meningkatkan produksi perikanan budidaya, dengan sasaran program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perikanan budidaya (volume dan nilai). Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan;
- b. Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan;
- c. Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan;
- d. Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan;
- e. Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan;
- f. Pengawasan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya;
- g. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Ditjen PB).

Unit kerja penanggung jawab program adalah Ditjen Perikanan Budidaya.

3. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Tujuan program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan adalah mewujudkan produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional, dengan sasaran peningkatan nilai ekspor hasil perikanan, peningkatan volume produk olahan, peningkatan rata-rata konsumsi ikan nasional, peningkatan nilai produk non konsumsi pada tingkat pedagang besar, dan peningkatan nilai investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan;
- b. Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan;
- c. Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan;
- d. Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan;
- e. Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi;
- f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ditjen P2HP).

Unit kerja penanggung jawab program adalah Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

4. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Tujuan program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah mewujudkan tertatanya dan dimanfaatkannya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari, dengan sasaran antara lain peningkatan luas Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutan, pengembangan pengelolaan pulau-pulau kecil, dan jumlah produksi garam. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Pendayagunaan Pesisir dan Lautan;
- c. Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis;
- e. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha;

- f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen KP3K).

Unit kerja penanggung jawab program adalah Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tujuan program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah meningkatnya ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sasaran perairan Indonesia bebas *illegal fishing* serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
- b. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
- c. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas;
- d. Peningkatan Operasional Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan;
- e. Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;
- f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP).

Unit kerja penanggung jawab program adalah Ditjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

6. Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Tujuan program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) serta menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional dengan sasaran meningkatnya prosentase media pembawa yang memenuhi sistim jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area, menurunnya jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra, dan meningkatnya jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan sebagai persyaratan ekspor. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Pengembangan dan pembinaan perkarantinaan ikan;
- b. Pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;

- c. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu di Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - d. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan.
- Unit kerja penanggung jawab program adalah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM).

7. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan

Tujuan program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan ini adalah menyiapkan ilmu, pengetahuan dan teknologi sebagai basis kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran diadopsinya dan dimanfaatkannya Iptek hasil penelitian dan pengembangan oleh para pemangku kepentingan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan;
 - b. Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya;
 - c. Pengkajian dan Perekayasa Teknologi Kelautan dan Perikanan;
 - d. Penelitian dan Pengembangan Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir;
 - e. Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan;
 - f. Penelitian dan Analisis Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan;
 - g. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang Kelautan dan Perikanan).
- Unit kerja penanggung jawab program adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

8. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Tujuan program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan adalah meningkatkan kualitas SDM kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
- b. Pelatihan Kelautan dan Perikanan;
- c. Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- d. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP).

Unit kerja penanggung jawab program adalah Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan.

9. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP

Tujuan program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP adalah meningkatkan efektifitas peran pengawasan internal dengan sasaran program peningkatan kinerja dan akuntabilitas Aparatur KKP, terwujudnya AKIP yang efektif di KKP, dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal, BPSDMKP dan BKIPM serta pelaksana pembangunan KP.
- b. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP serta pelaksana pembangunan KP.
- c. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen KP3K serta pelaksana pembangunan KP.
- d. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Ditjen P2HP dan Balitbang KP serta pelaksana pembangunan KP.
- e. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dengan Tujuan Tertentu pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal.
- f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal.

Unit kerja penanggung jawab program adalah Inspektorat Jenderal.

10. Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

Tujuan program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP adalah meningkatkan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KKP, kualitas akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan KKP. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring Evaluasi Pembangunan KP;
- b. Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian KKP;
- c. Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP;

- d. Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP;
 - e. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP;
 - f. Pengembangan Data, Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan;
 - g. Pengembangan dan Pembinaan Kerjasama Internasional dan Antar Lembaga Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - h. Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan.
- Unit kerja penanggung jawab program adalah Sekretariat Jenderal.

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan, serta target pembangunan 2010-2014 menurut program dan kegiatan yang telah terinci dalam *output* dan *outcome*. Pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 telah tertuang dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, yakni dengan pagu indikatif sebesar Rp. 30,42 triliun. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu yakni periode tahun 2010-2012, maka pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan telah dilakukan penyesuaian berdasarkan *resource envelope* yang dialokasikan setiap tahun melalui pagu anggaran KKP tahun 2010-2012. Rincian indikator kinerja program, kegiatan, target, dan kebutuhan pendanaan per program dan per kegiatan tahun 2013-2014 sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran II.

D. Dukungan Lintas Sektor

Pembangunan kelautan dan perikanan secara utuh memerlukan dukungan instansi terkait serta peran serta masyarakat luas. Adapun beberapa bentuk dukungan kegiatan yang diperlukan dari instansi terkait antara lain sebagaimana tabel berikut:

Dukungan Lintas Sektor yang Diharapkan

No	Kegiatan	Dukungan yang Diharapkan	K/L dan Institusi Terkait
1.	Penyediaan sarana dan prasarana pada kawasan atau sentra produksi perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan sarana air bersih b. Pembangunan akses jalan dan jalan lingkungan c. Pembangunan saluran irigasi untuk budidaya perikanan d. Penyediaan jaringan listrik e. Penyediaan BBM perikanan dan pasokan untuk SPDN 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral • Kementerian Kesehatan • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kegiatan	Dukungan yang Diharapkan	K/L dan Institusi Terkait
		f. Penyediaan sarana, prasarana, dan layanan kesehatan g. Penyediaan sarana, prasarana, dan layanan pendidikan	
2.	Penyediaan permodalan usaha kelautan dan perikanan	a. Skim khusus untuk usaha kelautan dan perikanan b. Penyediaan alokasi dana bergulir melalui mekanisme Badan Layanan Umum (BLU)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Keuangan • Perbankan • Lembaga Keuangan lainnya
3.	Pengendalian impor ikan ilegal	a. Pengawasan impor ikan b. Pengawasan distribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Keuangan (Bea Cukai) • Kementerian Perdagangan
4.	Pemberantasan <i>illegal fishing</i>	Operasi pengawasan terpadu pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • TNI-AL • POLRI • BAKORKAMLA
5.	Pengembangan iptek kelautan dan perikanan	a. Penelitian dasar di bidang kelautan dan perikanan b. Penelitian dan Eksplorasi Sumber Daya Laut Dalam dan Dasar Laut c. Kerjasama penelitian dan rekayasa teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • LIPI • BPPT • BMKG • Badan Informasi Geospasial • Perguruan Tinggi

E. Kerjasama Luar Negeri

Kebijakan kerjasama luar negeri bidang kelautan dan perikanan adalah :

- a. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama internasional baik kerjasama bilateral, regional maupun multilateral serta kerjasama antar lembaga nasional dan internasional di bidang kelautan dan perikanan (pemerintah, dunia usaha, asosiasi, *stakeholders*, LSM);
- b. Meningkatkan peran serta KKP dalam menentukan kebijakan di forum-forum atau organisasi internasional di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Meningkatkan kerjasama teknik dengan negara-negara sahabat sebagai sarana untuk percepatan pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya dalam penguasaan teknologi.

Sedangkan prinsip-prinsip khusus untuk pengembangan kerjasama luar negeri adalah:

- a. Mengutamakan pelestarian terhadap sumber daya alam kelautan dan perikanan;

- b. Memberikan perlindungan terhadap nelayan dan pelaku usaha perikanan;
- c. Mengupayakan peningkatan pengetahuan dan kapasitas SDM dalam bidang kelautan dan perikanan;
- d. Menjunjung tinggi penegakan kedaulatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam kaitan ini, KKP telah melakukan kerjasama luar negeri, baik kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral. Kerjasama bilateral dilaksanakan dengan beberapa negara seperti: Australia, China, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Malaysia, Mesir, Norwegia, Perancis, Spanyol, Swedia, Belanda, Thailand, Amerika Serikat, Kenya, Viet Nam, dan Arab Saudi. Kerjasama regional dilaksanakan dalam rangka kerjasama ASEAN, APEC, CTI, IOTC, CCSBT, WCPFC, NACA, BIMP-EAGA, IMT-GT, AFCF, ASWGF, AMAF, SEAFDEC, dan D-8. Sedangkan kerjasama multilateral dilakukan bersama FAO, UNICPOLOS, UNFSA, UNFCCC, UNEP, UNESCO, UNIDO, WTO, ILO, dan IMO.

Dalam rangka penguatan kerjasama luar negeri, KKP akan terus :

1. Mendukung perjuangan kepentingan nasional R.I. melalui kerjasama luar negeri;
2. Mendukung diplomasi R.I. di dunia internasional;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui kerja sama luar negeri;
4. Menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan global agar tetap bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat R.I.;
5. Mendukung upaya penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan institusi kelautan dan perikanan;
6. Mendapatkan transfer teknologi tepat guna di sektor kelautan dan perikanan guna mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF)* telah dibentuk Sekretariat Nasional CTI-CFF Indonesia, yang akan mengoordinasikan beberapa kegiatan meliputi bentang laut, pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, pengembangan Kawasan Konservasi Perairan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan pengelolaan spesies terancam punah.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan bekerjasama dengan negara-negara anggota CTI-CFF, donor, dan partner serta dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah lokasi pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010-2014 merupakan suatu dokumen yang disusun oleh KKP, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, visi serta misi Presiden terpilih serta program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II masa bakti 2009-2014, dan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Dengan adanya penyesuaian terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam dokumen Renstra KKP 2010-2014, maka dokumen ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) KKP dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KKP tahun 2013-2014.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan juga dihasilkan berkat adanya dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR PER.15/MEN/2012
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN TAHUN 2010-2014

PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, TARGET DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013-2014

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
			2013	2014	2013	2014
PROGRAM						
1	Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap a. Volume produksi (ton) b. Nilai Produksi (Rp. Juta) Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jumlah pendapatan nelayan: - Pendapatan nelayan pemilik/bulan (Rp) - Pendapatan nelayan buruh/bulan (Rp)	5,467,120 112 2,235,900 952,692	5,500,000 115 2,441,550 1,200,000	1,602,852	2,244,960
KEGIATAN						
A	Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)				55,000	75,000
		Jumlah ekosistem Perairan Umum Daratan (PUD) yang terkelola sumber daya ikannya (Provinsi)	8	8		
		Jumlah perairan laut teritorial dan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (WPP)	11	11		
		Jumlah ZEEI yang terkelola sumberdaya ikannya	4	6		
		Persentase kapal perikanan indonesia (KII) berukuran > 30 GT yang beroperasi di laut lepas dan melaksanakan ketentuan RFMO (%)	75	80		
		Kelengkapan data dan statistik perikanan tangkap yang akurat di seluruh provinsi dan UPT Pelabuhan Perikanan (Prov)	33	33		
		Jumlah perairan yang terevaluasi pengelolaan sumberdaya ikannya (WPP)	3	3		
B	Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan				467,000	442,500
		Jumlah kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan (unit)	650	700		
		Jumlah kapal >30 GT yang terbangun (unit)	125 (125 kapal lainnya dipenuhi melalui DAK)	190		
		Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar (unit)	1552	2929		
		Jumlah awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya dan tersertifikasi (orang)	210	240		
		Jumlah kapal perikanan yang telah dilengkapi dengan buku kapal (unit)	10,000	13,000		
		Jumlah standar dan sertifikasi dari inovasi alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan, kapal penangkap ikan yang dihasilkan (buah)	20	20		
		Jumlah kapal 10-30 GT yang terbangun (unit)	65	65		
		Jumlah dokumen teknis produktivitas perjenis alat penangkap ikan terkait jenis ikan hasil tangkapan (dokumen)	1	1		
		Jumlah pembinaan, laminasi kapal dan pengadaan sarana penanganan ikan dalam rangka industrialisasi KP (lokasi)	5	5		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
			2013	2014	2013	2014
C	Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan				457,000	1,252,960
		Jumlah pelabuhan yang dibina, termasuk pelabuhan di lingkaran luar dan daerah perbatasan yang potensial	816	816		
		Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk (lokasi)	25	30		
		Jumlah pelabuhan perikanan yang optimal melakukan kegiatan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP), K3, Operasional Pelabuhan Perikanan (lokasi)	20	20		
		Jumlah lanjutan pembangunan pelabuhan UPT Daerah untuk mendukung minapolitan, termasuk lingkaran luar dan daerah perbatasan yang potensial (lokasi)	20	119		
		Jumlah pengembangan, peningkatan operasional, dan kualitas layanan pelabuhan perikanan UPT Pusat, termasuk di lingkaran luar dan daerah perbatasan yang potensial (lokasi)	22	22		
		Jumlah Pelabuhan Perikanan yang melaksanakan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (buah)	72	102		
		Jumlah Pelabuhan Perikanan yang terpantau dan dievaluasi (buah)	50	70		
D	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan				24,852	34,000
		Jumlah dokumen usaha perikanan tangkap yang diterbitkan (dokumen)	10,000	12,000		
		Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku (orang/badan hukum)	3,500	4,500		
		Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan menangkap di WPP dan laut lepas (unit)	6,900	8,900		
		Waktu pelayanan usaha penangkapan ikan (SIUP, SIPI, SIKPI) (hari/dokumen permohonan)	7	7		
		Jumlah pembinaan pelayanan usaha penangkapan ikan kewenangan daerah (provinsi)	33	33		
		Presentase jumlah realisasi kapal dari alokasi dalam SIUP (Persen)	70	80		
E	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil				444,500	268,000
		Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri (lokasi)	43	83		
		Jumlah pengembangan kelembagaan kelompok usaha bersama (KUB) yang mandiri (KUB)	1,400	1,800		
		Jumlah Kelompok Nelayan KUB Penerima Pengembangan Usaha Mina Pedesaan /PUMP di lokasi PKN	2,000	1,000		
		Jumlah Kelompok Nelayan KUB Penerima Pengembangan Usaha Mina Pedesaan /PUMP di lokasi non PKN	1,000	1,000		
		Jumlah pembinaan kenelayanan (lokasi)	43	83		
		Jumlah Pengembangan investasi dan pemodalannya (lokasi)	43	83		
		Jumlah pembinaan dan pengelolaan usaha mendukung minapolitan (lokasi)	33	83		
F	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap				154,500	172,500
		Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat	3	3		
		Jumlah SDM aparatur kompeten yang dikelola sesuai kebutuhan	3	3		
		Jumlah fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan	3	3		
		Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	3	3		
PROGRAM						

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
			2013	2014	2013	2014
2	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	13,020,800	16,891,000	1,824,788.5	1,317,816.0
		- Produksi perikanan budidaya air tawar (ton)	3,408,505	4,580,605		
		- Produksi perikanan budidaya air payau (ton)	1,831,620	2,022,220		
		- Produksi perikanan budidaya laut (ton)	7,780,675	10,288,175		
KEGIATAN						
A	Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan				103,201.0	138,898.0
		Jumlah unit pembudidayaan ikan tersertifikat dan memenuhi standar (Unit)	7,000	10,000		
		Jumlah jenis pakan ikan terdaftar (jenis)	550	600		
		Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya (kelompok)	132	145		
		Jumlah Terbitan Statistik Perikanan Budidaya	5	5		
		Jumlah RSNI 3 yang disusun	16	20		
		Jumlah produksi ikan hias (Ribu Ekor)	1,100,000	1,500,000		
		Jumlah luas lahan minapadi (Hektar)	250,000	250,000		
B	Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan				117,655.0	138,118.0
		Jumlah produksi induk unggul (juta induk)	13	15		
		Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit)	140	165		
		Jumlah benih dengan mutu terjamin (milyar benih)	61	72		
		Jumlah bibit rumput Laut (ton)	750,000	1,000,000		
		Jumlah unit pembenihan skala besar operasional (unit)	208	250		
		Jumlah unit pembenihan skala kecil operasional (unit)	33,095	40,000		
		Jumlah data informasi dan distribusi perbenihan (laporan)	3	3		
		Jumlah RSNI 3 yang disusun	20	26		
C	Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan				65879	88638
		Laboratorium uji yang memenuhi standar teknis (Lab. Kualitas air; Lab HPI dan Lab. Residu)	43	48		
		Jumlah sentra produksi budidaya yang terkendali dan terhabilitasi perairannya (sentra budidaya)	71	91		
		Jumlah penyakit ikan penting yang dapat dikendalikan (jenis penyakit)	15	20		
		Persentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau di bawah ambang batas residu yang diperbolehkan sesuai dengan permintaan pasar (persen)	96	97		
		Jumlah obat ikan, bahan kimia dan biologi dan sesuai ketentuan (nomor pendaftaran)	202	217		
		Jumlah RSNI 3 yang disusun	20	25		
D	Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan				500,627.0	471,755.0
		Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan (kelompok)	1,957	3,388		
		Jumlah tenaga kerja perikanan budidaya (orang)	6.343.353	7,765,587		
		Jumlah pemberdayaan kelompok pembudidaya melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di lokasi PKN (kelompok)	300	350		
		Jumlah pemberdayaan kelompok pembudidaya melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di lokasi non PKN (kelompok)	3,700	4,650		
		Jumlah Investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya (Milyar Rupiah)	21,799	19,346		
		Jumlah modal kerja perikanan budidaya (Milyar rupiah)	11,702	12,684		
		Jumlah kredit program perikanan budidaya (Milyar rupiah)	250	300		
		Unit usaha yang memperoleh layanan dan yang beraktivitas sesuai dengan ketentuan (unit)	580	640		
		Informasi dan promosi usaha perikanan budidaya (paket)	33	33		
E	Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan				866,099.0	313,803.0

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
			2013	2014	2013	2014
		Luas lahan yang difasilitasi sesuai target produksi perikanan budidaya (Ha: kab./kota)	1,291,666	1,365,416		
		Jumlah kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai (kawasan payau; kawasan tawar; kawasan laut)	449 (120: 197;132)	541 (145 :238: 158)		
		Jumlah pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya (kabupaten/kota)	65	85		
		Jumlah RSNI 3 yang disusun	8	13		
		Jumlah kawasan potensial perikanan budidaya (kab./kota)	130	150		
F	Pengawasan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya				67,107.0	36,471.0
		Jumlah diseminasi teknologi dalam rangka pengembangan kawasan budidaya	71	91		
		Teknologi inovatif budidaya hasil perekayasaan	14	14		
		Jumlah kawasan budidaya binaan yang telah melaksanakan teknologi adaptif perikanan budidaya (kawasan)	106	136		
		Jumlah tenaga teknis binaan (orang)	1,600	1,700		
		Pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (sampel)	6,500	7,000		
G	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. Perikanan Budidaya				170,099.5	218,771.0
		Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat	3	3		
		Jumlah pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan	3	3		
		Jumlah fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan	3	3		
		Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya	3	3		

PROGRAM

3	Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Nilai Ekspor (US\$ Milyar)	4.20	5.00	862,776.0	859,656.0
		Konsumsi Ikan per kapita (kg/kap)	35.14	38.00		
		Volume Produk Olahan hasil perikanan (Juta Ton)	5.00	5.20		
		Nilai Produk Non konsumsi pada Tingkat Pedagang Besar (Rp. Triliun)	1.50	2.00		
		Nilai Investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Rp. Triliun)	2.50	3.00		

KEGIATAN

A	Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan				234,026.0	275,250.0
		Lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan dan dibina (Lokasi)	113 (30 baru, 83 lanjutan)	150 (37 baru, 113 lanjutan)		
		Ragam produk olahan hasil perikanan bernilai tambah (ragam)	46 (14 baru, 32 lanjutan)	60 (14 baru, 46 lanjutan)		
		Lokasi pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan untuk usaha skala mikro, kecil dan menengah (lokasi)	37 (5 baru, 32 lanjutan)	47 (10 baru, 37 lanjutan)		
		Unit Pengolahan Ikan yang ber-Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	1,995	2,570		
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Besar yang dikembangkan dan dibina dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan (UPI)	219 (40 Baru, 179 lanjutan)	279 (60 Baru, 219 lanjutan)		
		Standard Nasional Indonesia yang dikembangkan dan diterapkan dalam pengolahan hasil perikanan (RSNI)	5 RSNI	5 RSNI		
B	Fasilitasi Penguatan Dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan				148,000.0	147,000.0
		Lokasi pembinaan pasar hasil perikanan dalam negeri (pasar)	7,000	7,000		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
			2013	2014	2013	2014
		Lokasi pengembangan dan pembinaan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan dalam negeri (lokasi)	106 (20 Baru, 86 Lanjutan)	151 (45 Baru, 106 Lanjutan)		
		Lokasi pengembangan dan pembinaan promosi dan kerjasama pemasaran hasil perikanan dalam negeri (provinsi)	33	33		
C	Facilitasi Penguatan Dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan				90,500.0	29,250.0
		Jumlah peningkatan negara tujuan dan jumlah eksportir hasil perikanan berskala UKM yang dibina dan dikembangkan dalam rangka pengembangan ekspor hasil perikanan (negara, UKM)	3 negara 30 UKM	5 negara 50 UKM		
		Jumlah impor sesuai standar yang dikendalikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan industri (% terhadap nilai ekspor)	< 20	< 20		
		Negara yang mengimplementasikan kerjasama pemasaran luar negeri hasil perikanan, serta negara yang memberikan penilaian citra positif terhadap produk perikanan Indonesia (negara, negara)	1 negara 4 negara	4 negara 7 negara		
		Negara tujuan ekspor yang menurun hambatan regulasi tarif (negara)	1	1		
		Negara yang terpetakan potensi dan daya-saing pasarnya dengan data terkini dan akurat (<i>market intelligence</i>) (negara)	20	40		
D	Facilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan				238,250.0	156,000.0
		Jumlah Usaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Usaha Skala Besar (USB) bidang P2HP yang melakukan kemitraan usaha dalam rangka pengembangan minapolitan	1200 UMKM 40 USB	1500 UMKM 60 USB		
		Jumlah tenaga kerja pada Kelompok pengolah dan pemasar (POKLAHSAR) yang dibina dan dikembangkan sehingga memenuhi standar wirausaha dan ketenagakerjaan yang kompeten dan kapabel dalam rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di lokasi PKN	5000 tenaga kerja 1000 poklahsar	5000 tenaga kerja 1000 poklahsar		
		Jumlah tenaga kerja pada kelompok pengolah dan pemasar (POKLAHSAR) yang dibina dan dikembangkan sehingga memenuhi standar wirausaha dan ketenagakerjaan yang kompeten dan kapabel dalam rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di lokasi non PKN	2500 tenaga kerja 500 poklahsar	5000 tenaga kerja 1000 poklahsar		
		Lokasi pengembangan pusat produksi dan industri pengolahan rumput laut di koridor ekonomi (lokasi)	0	5		
		Nilai investasi UMKM (Rp. Milyar) melalui pembinaan dan pengembangan KKMB (KKMB)	200 Rp. Milyar 1300 KKMB	250 Rp. Milyar 1800 KKMB		
		Jumlah provinsi yang terinformasikan dan terfasilitasinya promosi peluang usaha dan investasi bidang P2HP (Prov)	33 prov. Terinformasi 7 prov. Terfasilitasi	33 prov. Terinformasi 7 prov. Terfasilitasi		
		Jumlah rekomendasi kebijakan dan/atau peraturan pelayanan usaha hasil perikanan dalam rangka peningkatan investasi bidang P2HP (Rekomendasi)	4	4		
E	Facilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Nonkonsumsi				37,000.0	55,500.0
		Lokasi sarana dan prasarana pengembangan dan pembinaan produk hasil perikanan nonkonsumsi (lokasi)	50 (15 Baru, 35 Lanjutan)	80 (30 Baru, 50 Lanjutan)		
		Lokasi pengembangan promosi dan jaringan pemasaran ikan hias (provinsi, negara)	33 Provinsi; 4 Negara	33 Provinsi; 5 Negara		
		Ragam produk hasil perikanan nonkonsumsi yang dibina dan dikembangkan (ragam)	15 Ragam (5 baru, 10 lanjutan)	20 Ragam (5 baru, 15 lanjutan)		
		Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Produk Hasil Perikanan Nonkonsumsi Yang Dibina dan dikembangkan (UMKM)	50 UMKM	50 UMKM		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
			2013	2014	2013	2014
		Standar Nasional Indonesia yang dirumuskan, disosialisasikan, dan diterapkan dalam pengembangan produk hasil perikanan nonkonsumsi (RSNI)	5 RSNI	5 RSNI		
F	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP				115,000.0	196,656.0
		Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran	3 dokumen	3 dokumen		
		Jumlah pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan	3 dokumen	3 dokumen		
		Jumlah fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, humas	3 dokumen	3 dokumen		
		Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahaan di lingkungan Ditjen P2HP	3 dokumen	3 dokumen		
		Jumlah dukungan penerapan inovasi teknologi pengolahan, pengujian produk dan monitoring, serta pemasaran hasil perikanan	4 dokumen	4 dokumen		
		Kelengkapan data dan statistik P2HP yang akurat di seluruh provinsi (Prov)	33 Provinsi	33 Provinsi		
PROGRAM						
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi ketahanannya terhadap ancaman kerusakan	17 kawasan	18 kawasan	605,275.0	864,930.0
		Jumlah ragam produk kelautan yang terfasilitasi pengembangannya	3 produk	3 produk		
		Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki perencanaan pengelolaan	60 lokasi	60 lokasi		
		Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	3.647.500 ha	4.5 jt ha		
		Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola	60 pulau	30 pulau		
		Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri serta jumlah usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	7.097 klpk; 5.608 orang; 150 unit;	11.140 klpk; 7.108 orang; 190 unit		
		Jumlah produksi garam yang dihasilkan (ton)	1,845 jt ton	3,3 jt ton		
KEGIATAN						
A	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis				55,000.0	181,430.0
		Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	3.647.500 ha	4.5 jt ha		
		Bertambahnya luas kawasan konservasi perairan	500 rb ha	300 rb ha		
		Jumlah jenis yang dikonservasi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan	12	15		
		Persentase penguatan kelembagaan konservasi	5%	5%		
B	Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil				43,000.0	51,600.0
		Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10	10		
		Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah nasional, lintas wilayah, Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	20	20		
		Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki dokumen rencana Zonasi Rinci Kawasan	5	10		
		Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah nasional, lintas wilayah, Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diinisiasi legalitasnya	10	10		
C	Pendayagunaan Pesisir dan Lautan				62,000.0	74,400.0
		Jumlah luasan kawasan di wilayah pesisir rusak yang direhabilitasi	110 ha	120 ha		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
			2013	2014	2013	2014
		Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap bencana dan perubahan iklim	25 kawasan	50 kawasan		
		Jumlah ragam produk kelautan yang terfasilitasi pengembangannya	3 produk	3 produk		
D	Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil				137,000.0	104,400.0
		Jumlah pulau kecil yang dipetakan potensinya, termasuk pulau-pulau kecil terluar	60	30		
		Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi penyediaan infrastruktur termasuk pulau-pulau kecil terluar	60	30		
		Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi perbaikan lingkungan dan adaptasi berbasis mitigasi	30	30		
		Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi kegiatan investasi	5	5		
E	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha				196,000.0	306,700.0
		Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	7.097 klpk; 5.608 orang	11.140 klpk; 7.108 orang		
		Jumlah sarana usaha mikro yang beroperasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	150 unit	190 unit		
		Jumlah kelompok yang menerima pemberdayaan usaha garam rakyat/PUGAR dan jumlah produksi garam yang dihasilkan di lokasi PKN	800 kelompok 700 ribu ton	1100 kelompok 700 ribu ton		
		Jumlah kelompok yang menerima pemberdayaan usaha garam rakyat/PUGAR dan jumlah produksi garam yang dihasilkan di lokasi non PKN	1400 kelompok 1,145 juta ton	2400 kelompok 2,6 jt ton		
F	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K				112,275.0	146,400.0
		Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat	6 dokumen	6 dokumen		
		Jumlah pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan	1 dokumen	1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan	3 dokumen	3 dokumen		
		Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumah tangga di lingkungan Ditjen KP3K	2 dokumen	2 dokumen		
PROGRAM						
5	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) yang Terawasi dari illegal fishing	33%	60%	785,798.0	812,570.0
		Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) yang terawasi dari kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan	25%	37%		
		Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu	73%	74%		
KEGIATAN						
A	Peningkatan Operasional Pengawasan sumber Daya Perikanan				30,500.0	41,900.0
		Persentase Kapal Perikanan yang Laik Operasi Penangkapan Ikan di Wilayah Barat	82%	95%		
		Persentase kapal perikanan yang Laik Operasi Penangkapan Ikan di Wilayah Timur	86%	95%		
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan	786	1,452		
		Persentase Usaha Budidaya Ikan yang Sesuai dengan Ketentuan	70%	100%		
		Persentase Usaha Pengolahan, Pemasaran dan Pengangkutan Hasil Perikanan yang Sesuai dengan Ketentuan	70%	100%		
B	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan				17,000.0	22,400.0
		Persentase cakupan wilayah pesisir dan lautan pada WPP-NRI yang terawasi dari kegiatan dan pemanfaatan ekosistem dan kawasan konservasi perairan ilegal dan/atau yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya [WPP 711, 712, 713, 715]	32%	50%		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
			2013	2014	2013	2014
		Persentase cakupan wilayah pesisir dan lautan WPP-NRI yang terawasi dari kegiatan Pencemaran Perairan yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya [WPP 711, 712, 713, 715]	28%	40%		
C	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas				317,500.0	275,670.0
		Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPP-NRI] bagian barat yang terawasi dari <i>illegal fishing</i> [WPP 711]	24.5% (125 Hari operasi kapal)	57.03% (180 Hari operasi kapal)		
		Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPP-NRI] bagian timur yang terawasi dari <i>illegal fishing</i> [WPP 716,718]	19.38% (125 Hari operasi kapal)	52.11% (180 Hari operasi kapal)		
D	Peningkatan Operasional Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan				303,000.0	337,400.0
		Jumlah Pemenuhan Sistem Pemantauan SDKP yang terintegrasi dan akuntabel				
		- Kapal Pengawas [unit]	1	7		
		- Speed Boat Pengawas [unit]	10	23		
		- Radar Pantai (Unit)	0	1		
		- Transmitter VMS Offline (Unit)	0	500		
		- Kapal Tangkapan yang Direkondisi [unit]	0	0		
		- Kantor Pengawas [unit]	12	9		
		- Dermaga [unit]	2	2		
		- Pos Pengawas [unit]	7	15		
		- Mess ABK [unit]	3	8		
		- Gudang Barang Bukti [unit]	2	6		
		- Detention Centre [unit]	1	1		
		Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan yang dapat dipantau 4 WPP (WPP 711, 712, 713, 715)	50%	100%		
E	Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan				19,000.0	21,100.0
		Persentase penyelesaian tindak pidana perikanan yang disidik secara akuntabel dan tepat waktu	73%	74%		
		Persentase penanganan barang bukti dan awak kapal secara akuntabel	73%	74%		
		Jumlah forum koordinasi antar aparat penegak hukum yang terbentuk/diselenggarakan [Kali]	3	3		
		Jumlah PPNS Perikanan yang dididik dan ditingkatkan kompetensinya [orang]	60	60		
F	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP				98,798.0	114,100.0
		Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat (dokumen)	7	7		
		Jumlah pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan (dokumen/orang)	16 dan 129	16 dan 150		
		Jumlah fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan (dokumen)	4	4		
		Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahaan di lingkungan Ditjen PSDKP (dokumen)	5	5		
PROGRAM						
6	Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Prosentase media pembawa yang memenuhi sistim jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan Ikan ekspor, impor dan antar area	96%	98%	304,176.0	450,000.0
		Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra	≤ 10	≤ 10		
		Jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan sebagai persyaratan ekspor	1,115 Sertifikat	1,125 Sertifikat		
KEGIATAN						

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
			2013	2014	2013	2014
A	Pengembangan dan Pembinaan Perkarantina Ikan				15,425.0	21,825.0
		Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diimplementasikan pada UPT BKIPM	88 SOP	98 SOP		
		Jumlah instalasi yang sesuai standar dan laboratorium karantina ikan yang terakreditasi	2 IKIS, 5 Lab	2 IKIS, 5 Lab		
B	Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan				24,000.0	33,840.0
		Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil perikanan yang bersertifikat HACCP	520 UPI, 1115 sertifikat	520 UPI, 1125 sertifikat		
		Jumlah lokasi yang termonitor residu dan bahan berbahaya serta laboratorium dan jenis uji yang terakreditasi	20 Lokasi 5 Lab 6 Jenis uji	20 Lokasi 5 Lab 7 Jenis uji		
C	Pengembangan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan				15,575.0	20,550.0
		Jumlah pusat dan lokal otoritas kompeten (unit kerja) yang menerapkan sistem manajemen mutu produksi (pra panen dan pasca panen)	24 Unit kerja	33 Unit kerja		
		Jumlah laboratorium dan lembaga inspeksi yang menerapkan sistem manajemen mutu	31 Lembaga Inspeksi, 23 Lab	31 Lembaga Inspeksi, 33 Lab		
D	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM				249,176.0	373,785.0
		Prosentase media pembawa yang memenuhi sistim jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi ekspor, impor dan antar area di wilayah kerjanya	0.96	0.98		
		Jumlah metoda uji laboratorium yang divalidasi	46 Metoda	48 Metoda		
		Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat	3 Dok	3 Dok		
		Jumlah pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan dan fasilitasi produk hukum ketatalaksanaan	3 Dok	3 Dok		
		Jumlah sistem pelayanan informasi dan kehumasan di lingkungan BKIPM	3 Dok	3 Dok		
		Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan BKIPM	3 Dok	3 Dok		
PROGRAM						
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Rekomendasi Litbang yang Dijadikan Bahan Kebijakan Pembangunan Pusat dan/atau Daerah	5	7	536,313.0	712,780.0
		Jumlah Hasil Litbang Kelautan dan Perikanan yang Diadopsi oleh Masyarakat Kelautan dan Perikanan	8	9		
		Jumlah Pengguna Hasil Litbang Kelautan dan Perikanan	90	156		
KEGIATAN						
A	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya				121,527.0	186,000.0
		Jumlah rekomendasi dan bahan kebijakan untuk pengembangan perikanan budidaya	4	5		
		Jumlah model penerapan Iptek perikanan budidaya	7	13		
		Jumlah Paket/Inovasi Teknologi yang dihasilkan/ direkomendasikan/ diusulkan HKI/ Penghargaan, serta data dan informasi untuk peningkatan produksi dan produktifitas Perikanan Budidaya	13	17		
		Jumlah Produk Biologi (strain unggul/probiotik/ vaksin)	4	4		
		Jumlah Dukungan Teknis Litbang Perikanan Budidaya	7	7		
B	Pengkajian dan Perekayasa Teknologi Kelautan dan Perikanan				139,612.0	112,000.0
		Jumlah rekomendasi teknologi kelautan dan perikanan	2	2		
		Jumlah model penerapan teknologi kelautan dan perikanan	2	3		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
			2013	2014	2013	2014
		Jumlah paket/inovasi teknologi, rancang bangun/desain/data informasi teknologi kelautan dan perikanan	6	6		
		Jumlah prasarana/infrastruktur teknologi kelautan dan perikanan	1	-		
		Jumlah Dukungan Teknis Perekayasaan dan Pengkajian Teknologi Kelautan dan Perikanan	3	3		
C	Penelitian dan Pengembangan Iptek Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir				31,289.0	86,000.0
		Jumlah rekomendasi pengelolaan dan/atau model pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir	3	3		
		Jumlah model penerapan iptek sumberdaya laut dan pesisir	2	2		
		Jumlah Kawasan Pesisir dan WPP yang terpetakan sumberdaya, karakteristik dan dinamikanya	7 SDLP, 2 WPP	8 SDLP, 2 WPP		
		Jumlah Dukungan Teknis Litbang Sumberdaya Laut dan Pesisir	2	2		
D	Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan				79,427.0	142,000.0
		Jumlah rekomendasi pengelolaan perikanan dan konservasi sumberdaya ikan	4	9		
		Jumlah model pengelolaan perikanan dan konservasi sumberdaya ikan	2	3		
		Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan Laut, PUD, Kawasan Konservasi yang telah teridentifikasi karakteristik biologi perikanan, serta habitat sumberdaya, potensi produksi kapasitas penangkapan ikannya dan/atau kerentanan, kelangkaan dan keterancamannya kelestarian sumberdaya ikan dan habitatnya	4 WPP; 8 PUD; 6 KKP	4 WPP; 8 PUD; 6 KKP		
		Jumlah Dukungan Teknis Litbang Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan	5	5		
E	Penelitian dan Pengembangan Iptek Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan				90,667.0	82,500.0
		Jumlah rekomendasi iptek pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan	1	2		
		Jumlah model penerapan Iptek pengolahan produk kelautan dan perikanan	3	3		
		Jumlah Paket/Inovasi Teknologi, Usulan HKI/Penghargaan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	4	7		
		Jumlah Dukungan Teknis Litbang Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	2	2		
F	Penelitian dan Perekayasaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan				21,652.0	50,100.0
		Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan	4	4		
		Jumlah model kelembagaan pengembangan pembangunan/usaha kelautan dan perikanan berbasis Iptek	4	6		
		Jumlah data dan informasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan	11	11		
		Jumlah Dukungan Teknis Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	1	1		
G	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				52,139.0	54,180.0
		Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat	14	14		
PROGRAM						
8	Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	Jumlah SDM KP yang kompeten	55.000 orang	68.600 orang	560,610.0	672,520.0
KEGIATAN						
A	Pelatihan Kelautan dan Perikanan				118,750.0	165,000.0

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
			2013	2014	2013	2014
		Jumlah lulusan pelatihan yang sesuai standar kompetensi dan kebutuhan (orang)	13,900	17,200		
B	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan				94,500.0	140,000.0
		Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh	4,200	5,000		
		Jumlah penyuluh perikanan yang melakukan penyuluhan KP (orang)	12,000	15,350		
C	Pendidikan Kelautan dan Perikanan				299,250.0	317,520.0
		Jumlah lulusan pendidikan yang kompeten sesuai standar dan kebutuhan (orang)	1,400	1,700		
		Jumlah lulusan yang terserap di dunia usaha dan industri (orang)	1190 (85% lulusan)	1530 (85% lulusan)		
		Jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan	1595 (35% lulusan)	1942 (40% lulusan)		
D	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPSDMKP				48,110.0	50,000.0
		Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat	3	3		
		Jumlah SDM aparatur kompeten yang dikelola sesuai kebutuhan	3	3		
		Jumlah fasilitas produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan	3	3		
		Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumah tangga di lingkungan BPSDMKP	3	3		
PROGRAM						
9	Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	Opini BPK-RI atas LK KKP	WTP	WTP	70,503.0	80,000.0
		Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi KKP	baik	baik		
		Nilai AKIP KKP	A	A		
		Nilai Integritas KKP	6,75	7,00		
		Nilai Inisiatif Anti Korupsi KKP	8,00	9,00		
KEGIATAN						
A	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal (Setjen), BPSDMKP dan BKIPM serta Pelaksana Pembangunan KP				5,690.7	8,108.0
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pada Setjen, BPSDM KP dan BKIPM	70%	80%		
		Persentase implementasi SPIP lingkup KKP	50%	55%		
B	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP serta Pelaksana Pembangunan KP				5,558.9	7,948.0
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pada Ditjen PT dan Ditjen PSDKP	70%	80%		
		Nilai integritas KKP	6,75	7,00		
		Nilai inisiatif anti korupsi KKP	8,00	9,00		
C	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen KP3K serta Pelaksana Pembangunan KP				5,502.1	7,880.0
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pada Ditjen PB dan Ditjen KP3K	70%	80%		
		Nilai AKIP KKP	A	A		
D	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Ditjen P2HP dan Badan Litbang KP serta Pembangunan KP				5,644.9	8,053.0
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen P2HP dan Balitbang KP	70%	80%		
		Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi KKP	baik	baik		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
			2013	2014	2013	2014
E	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dengan Tujuan Tertentu pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada Unit Kerja Itjen				5,602.8	8,001.0
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang dimanfaatkan untuk perbaikan bahan kebijakan dan peningkatan kinerja KKP dan rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Itjen	70%	80%		
		Opini Laporan Keuangan KKP	WTP	WTP		
		Persentase penyelesaian sanggahan dan sanggahan banding pengadaan barang/jasa lingkup KKP	100%	100%		
F	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan				42,503.6	40,010.0
		Persentase pelayanan administrasi di lingkup Itjen yang berkualitas	90%	100%		
PROGRAM						
10	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	Jumlah peraturan perundang-undangan bidang KP yang diterbitkan (produk)	54	56	504,674.0	628,400.0
		Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja KKP	Nilai AKIP "A"	Nilai AKIP "A"		
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP		
		Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di KKP yang telah terpenuhi	100%	100%		
		Jumlah perjanjian yang telah diimplementasikan (dokumen perjanjian)	27	27		
KEGIATAN						
A	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KP				89,278.9	127,500.0
		Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan yang terintegrasi, tepat waktu dan berbasis data yang akurat (dokumen)	25	25		
		Jumlah dokumen penganggaran yang terintegrasi, tepat waktu dan berbasis data yang akurat (dokumen)	6	6		
		Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi kinerja program pembangunan kelautan dan perikanan (dokumen)	4	4		
		Persentase penyaluran modal usaha untuk masyarakat kelautan dan perikanan				
B	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP				232,387.9	305,900.0
		Persentase pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan SOP dalam bidang kerumahtanggaan (%)	80	90		
		Persentase pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan SOP dalam bidang pengelolaan perlengkapan (%)	80	90		
		Persentase pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan SOP dalam bidang administrasi persuratan dan kearsipan (%)	85	90		
		Persentase penyelesaian gedung Kantor Pusat (GMB IV) (%)	70	100		
		Operasional sekretariat gedung CTI (%)	100			
C	Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP				16,000.0	18,000.0
		Jumlah peraturan perundang-undangan bidang teknis KP dan lintas sektor yang diterbitkan (produk)	54	56		
		Jumlah laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KKP (dokumen)	34	34		
		Persentase Pemenuhan Bantuan Hukum	100%	100%		
D	Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP				27,000.0	28,000.0

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		ALOKASI (JUTA)	
			2013	2014	2013	2014
		Persentase unit kerja yang menerapkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan pengelolaan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu (%)	100	100		
		Persentase dokumen pengelolaan pelaksanaan anggaran dan administrasi keuangan yang akurat dan tepat waktu (%)	98	98		
		Persentase laporan pengendalian dan monitoring pelaksanaan anggaran yang tepat waktu (%)	98	98		
E	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian KKP				16,000.0	18,000.0
		Jumlah SDM yang dialokasikan dalam pengembangan pegawai sesuai kebutuhan (orang)	500	500		
		Persentase pelayanan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pensiun dan mutasi pegawai lainnya yang tepat waktu (orang)	500	500		
		Jumlah pelayanan administrasi dan pengembangan jabatan fungsional sesuai kebutuhan	100%	100%		
		SK Pengangkatan dalam dan dari jabatan fungsional (SK)	650	700		
		Jumlah jabatan Fungsional (jabatan)	24	24		
F	Pengembangan dan Pembinaan Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga Bidang KP				23,000.0	30,000.0
		Jumlah hasil analisis dan evaluasi kerja sama bilateral (laporan)	27	27		
		Jumlah hasil analisis dan evaluasi kerja sama multilateral (laporan)	16	18		
		Jumlah hasil analisis dan evaluasi kerja sama antarlembaga (laporan)	16	18		
G	Pengembangan dan Pembinaan Data Statistik dan Informasi KP				51,507.1	60,000.0
		Jumlah dokumen data statistik kelautan dan perikanan terkini dan tepat waktu (dokumen data statistik)	8	8		
		Jumlah unit kerja yang terintegrasi dalam SIM-KKP antara pusat dan provinsi	33 Provinsi; 20 UPT	33 Provinsi; 20 UPT		
		Jumlah pemberitaan yang mendukung program KKP serta terbangunnya citra positif KKP	4,900	5,000		
H	Perumusan dan Pengembangan Kebijakan kelautan				22,500.0	13,000.0
		Jumlah dokumen perumusan kebijakan kelautan yang dapat menjadi masukan bagi pembangunan kelautan dan perikanan (dok. Kebijakan)	23	25		
JUMLAH					7,657,765.5	8,643,632.0

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Sekretariat Jenderal
Manung Cahyono

